



LAPORAN KINERJA

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2025



LAPORAN KINERJA

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT karena berkat rahmat-Nya, kami bisa menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian Laporan Kinerja ini, terutama kepada para pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur. Karena disadari atau tidak, pencapaian kinerja selama tahun 2025 ini merupakan perwujudan dari pekerjaan dan kerja sama kita sebagai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Laporan Kinerja adalah amanat dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana kami selaku Perangkat Daerah (PD) berkewajiban menyusun Laporan Kinerja untuk disampaikan kepada Bupati Kutai Timur sebagai pertanggungjawaban janji dan komitmen kerja.

Laporan Kinerja ini merupakan gambaran pencapaian kinerja kami selaku Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Selama setahun ini, banyak tugas dan pekerjaan yang telah kami laksanakan. Semua itu tidak luput juga dari khilaf dan kekurangan. Semoga saja apa pun yang telah kami kerjakan ini, menjadi manfaat dan kebaikan bagi kami selaku Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Kami mengharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi wujud transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini juga dapat menjadi sarana evaluasi atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Kutai Timur, serta memberikan umpan balik dan pemacu bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sangatta, 5 Januari 2026

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Kabupaten Kutai Timur



Ade Achmad Yulkefilah, S.T., M.M
NIP. 197507172007011014

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 adalah wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2025. Laporan Kinerja menggambarkan dan menyajikan pencapaian kinerja dan realisasi keuangan atas perjanjian kinerja yang ditandatangani antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Bupati Kutai Timur.

Hal ini juga merupakan kewajiban Perangkat Daerah untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum capaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur mencapai **80,78%** dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
1.3 ASPEK STRATEGIS	9
1.4 SISTEMATIKA	10
BAB II	11
PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1.1 VISI dan MISI	12
2.1.2 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA,SASARAN DAN KEBIJAKAN.....	13
2.1.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	17
2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2025.....	19
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	21
BAB III	24
AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun ini.....	25
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	26
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	28
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) `	31
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	32
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	33
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	35
B. REALISASI ANGGARAN	37

C. REALISASI ANGGARAN BPKAD KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025	46
BAB IV	54
PENUTUP	54
KESIMPULAN	54
RENCANA TINDAK	55



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah (PD) dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Penyelenggaraan SAKIP itu meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan Kinerja serta revidi dan evaluasi kinerja. Salah satu yang menjadi kewajiban Perangkat Daerah adalah menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, lalu menyampaikan Laporan Kinerja tersebut kepada Kepala Daerah.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atas penggunaan anggaran.

Tujuan pelaporan Kinerja ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Kutai Timur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala BPKAD, serta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur diuraikan ke dalam masing-masing bagian dan bidang yaitu:

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dan acuan kerja;
2. Mengoordinasikan penyusunan program kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan lingkup tugas sekretariat;
4. Merumuskan bahan pengelolaan dan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian; perencanaan program; dan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;



5. Memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Merumuskan bahan pengelolaan dan koordinasi dokumentasi, perpustakaan, arsip dan perlengkapan/perbekalan rumah tangga; serta pembinaan hubungan kemasyarakatan dan urusan keprotokolan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
7. Menghimpun, mengelola, dan menyajikan data/informasi berkaitan dengan penyelenggaraan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
8. Memfasilitasi kerja sama dengan instansi terkait, Kabupaten, instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
9. Menyinkronisasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang-bidang; Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran
10. Mengoordinasikan pengumpulan bahan Rencana Kerja Anggaran untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
11. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategi dan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
12. Mengendalikan kegiatan kesekretariatan dalam rangka mendukung kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
14. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
15. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan penilaian terhadap kinerja bawahan; dan
16. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:



1. Koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Kebijakan Umum Perubahan APBD/Prioritas Plafon Anggaran Sementara perubahan;
2. Koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
4. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Mengoordinasikan proses penyusunan anggaran pendapatan;
6. Mengoordinasikan proses penyusunan anggaran belanja daerah; dan
7. Mengoordinasikan proses penyusunan anggaran pembiayaan.

Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

1. Mengoordinasikan pengelolaan dan pemindahbukuan uang kas daerah;
2. Mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
3. Mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
4. Mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
5. Mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban gaji dan non gaji, serta penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran;
7. Mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);



8. Mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi kas;
9. Mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dengan instansi terkait;
10. Mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
11. Mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan Dana restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan.

Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

1. Mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
2. Mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
3. Mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. Mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
5. Melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
6. Menyusun tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
7. Melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
8. Menyusun analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
9. Menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;



10. Menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
11. Melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
12. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:

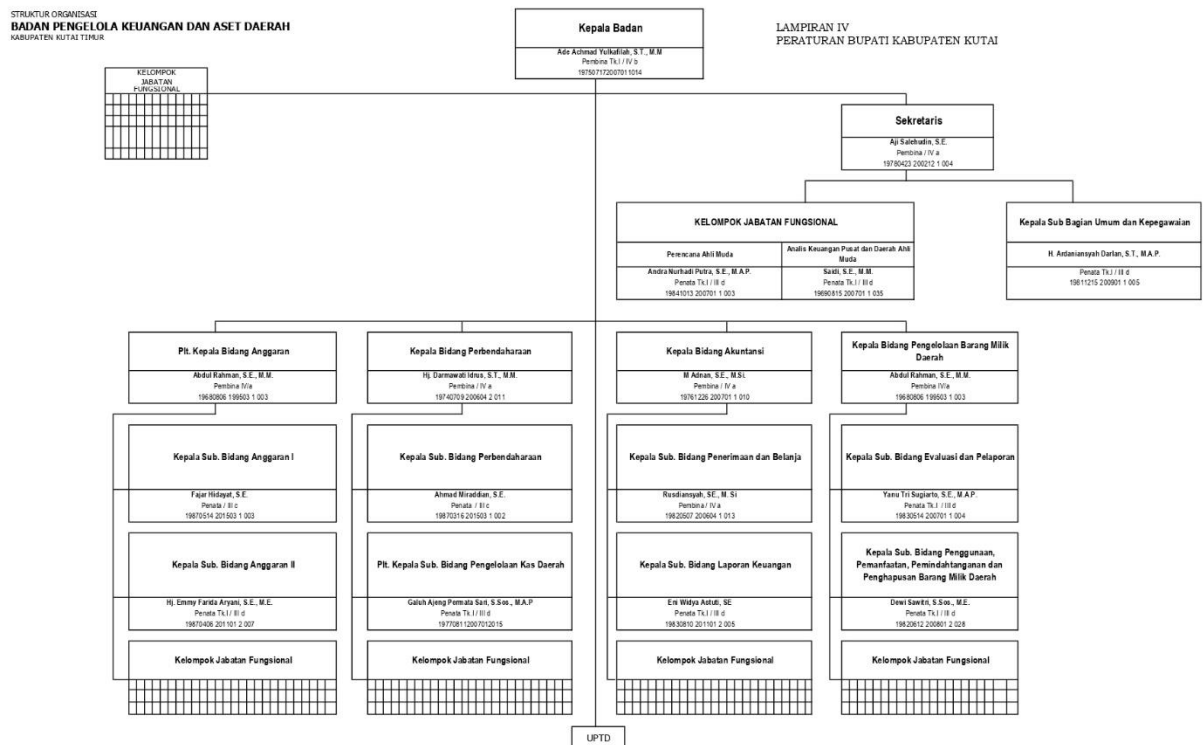
1. Mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
3. Mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
4. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah
6. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terkait pengelolaan barang milik daerah;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
8. Mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan dan meneliti dokumen terkait penggunaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
9. Mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
10. Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
11. Mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 12.



13. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah; dan
14. Mengoordinasikan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI





Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 134 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Rincian pegawai disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda (IV c)	-
2	Pembina Tk I (IV b)	1 orang
3	Pembina (IV a)	5 orang
4	Penata Tk I (III d)	13 orang
5	Penata (III c)	5 orang
6	Penata Muda Tk I (III b)	10 orang
7	Penata Muda (III a)	13 orang
8	Pengatur Tk I (II d)	6 orang
9	Pengatur (II c)	1 orang
10	Pengatur Muda Tk I (II b)	-
12	PPPK (Gol IX)	56 Orang
13	PPPK (Gol VII)	2 Orang
14	PPPK (Gol V)	22 Orang
Jumlah		134 Orang



1.3 ASPEK STRATEGIS

BPKAD Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menghadapi berbagai aspek strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah. Aspek strategis tersebut perlu mendapat perhatian karena pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Beberapa aspek strategis yang dihadapi BPKAD antara lain sebagai berikut;

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, Ketepatan waktu penyusunan APBD
2. Peningkatan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,
3. Optimalisasi pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah,
4. Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
5. Serta peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia
6. Pengelola keuangan dan aset daerah.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi menuntut BPKAD untuk terus meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dalam proses pengelolaan keuangan dan aset daerah. Integrasi dan konsistensi data antarperangkat daerah juga menjadi faktor penting dalam menghasilkan informasi keuangan dan aset yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aspek strategis lainnya adalah kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara BPKAD dengan seluruh perangkat daerah, sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, BPKAD berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan tata kelola, penguatan pengendalian, peningkatan kualitas pelayanan, serta peningkatan akuntabilitas kinerja guna mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas.



1.4 SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum BPKAD Kabupaten Kutai Timur, tugas dan fungsi, aspek strategis yang dihadapi, dasar hukum, serta sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan perencanaan strategis BPKAD Kabupaten Kutai Timur yang meliputi Rencana Strategis, sasaran strategis, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja Tahun 2025, serta rencana anggaran yang mendukung pencapaian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan capaian kinerja BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, serta upaya dan tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan atas pencapaian kinerja BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LKjIP dan memuat dokumen pendukung, antara lain Perjanjian Kinerja Tahun 2025, matriks pengukuran kinerja, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan.

The image shows a large, modern conference hall. The top half of the image shows the stage area with a large screen and bright lights. The bottom half shows the audience seated at long tables, facing the stage. The audience is diverse, with many women wearing hijabs. The room has a high ceiling with recessed lighting and decorative elements.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Timur merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD, khususnya dalam penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kabupaten Kutai Timur telah memiliki RPJMD tahun 2025-2030 yang menuangkan visi dan misi, serta RKPD tahun 2025.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku perangkat daerah telah menyusun perencanaan strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur (Renstra BPKAD) Tahun 2025-2030. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya Renstra BPKAD dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Renja) dan Perjanjian Kinerja.



Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun ke depan, untuk selalu menempatkan posisi organisasi pada kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya dan mampu menanggapi tuntutan lingkungannya sehingga di dalam perkembangan selanjutnya organisasi akan selalu tanggap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Oleh karena itu visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang merupakan komponen Renstra perlu dirumuskan bersama untuk dijadikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Adapun kerangka perumusan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

2.1.1 VISI dan MISI

Visi :

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD tahun 2025-2030 adalah:

**" TERWUJUDNYA KUTAI TIMUR TANGGUH,
MANDIRI DAN BERDAYA SAING"**

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan, Melalui Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat, Cerdas serta Berprestasi.



2. Transformasi Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Berbasis Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas;
4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Mendukung Konektivitas Antar Wilayah dan Pemerintah yang Berintegritas;
5. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu dan Berkesinambungan.

Berdasarkan Misi Kabupaten Kutai Timur di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Misi 3, yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas”**.

2.1.2 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN KEBIJAKAN

Tujuan Jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan implementasi dari pernyataan misi ke 4 pemerintah daerah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas” yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) Tahun kedepan. Adapun tujuan rencana strategis yang hendak dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah “Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas”.

Gambaran yang ingin dicapai ketika tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas
Dengan tercapainya tujuan ini maka diharapkan dapat terjadi peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan memberikan



pelayanan, terwujudnya good governance, dan peningkatan kepercayaan publik.

2. Pengelolaan Aset daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahun, semesteran, triwulan atau bulan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur, Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran-sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah suatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah merumuskan sasaran sebagai berikut:



Tabel 2.1.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	78	79	80	81	82	83
		Terwujudnya Pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan, Penataan, Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, Pendataan, dan Tata kelola Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM	Peningkatan akses dan kualitas keuangan dan aset daerah	Akselerasi Partisipasi dan Pengawasan Publik	Terwujudnya good Governance



2.1.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Secara konseptual, satu strategi dapat dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis.

Sementara itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra. Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Yang hendak dicapai Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas	Terwujudnya Pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan	1.1. Peningkatan kualitas perencanaan BMD 1.2. Peningkatan Kualitas Penatausahaan BMD	1.1.1 Meningkatkan kualitas penyusunan SHS 1.1.2 Meningkatkan kualitas RKBMD 1.1.3 Meningkatkan kapasitas SDM terkait perencanaan BMD 1.2.1 Penyusunan Laporan Penatausahaan BMD tepat waktu 1.2.2 Melaksanakan Inventarisasi BMD 1.2.3 Meningkatkan kualitas rekonsiliasi BMD



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		1.3 Pengoptimalan Penggunaan, penilaian, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	1.3.1 Mengoptimalkan proses Penggunaan, penilaian Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
		1.4. Menertibkan data administrasi dan fisik BMD	1.3.1 Penertiban aset daerah yang bermasalah melalui identifikasi kronologi dan koordinasi dengan pengguna barang Lembaga pengawasan Lembaga hukum dan Pemerintah Setempat
	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan	2.1 Peningkatan kualitas dari penyusunan APBD 2.2 Pengoptimalan layanan perbendaharaan keuangan daerah 2.3 Peningkatan kualitas dari pelaporan keuangan pemerintah daerah	2.1.1 Optimalisasi capaian target perencanaan anggaran keuangan daerah 2.2.1 Percepatan peningkatan layanan perbendaharaan keuangan daerah 2.3.1 Meningkatkan pembinaan terhadap OPD terkait dengan SAP



2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2025.

Rencana Kinerja BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis BPKAD serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025. Rencana kinerja ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target yang harus dicapai, serta program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pada Tahun Anggaran 2025, BPKAD Kabupaten Kutai Timur memfokuskan pelaksanaan kinerja pada, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), peningkatan kualitas perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Rencana kinerja tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terukur, dengan indikator dan target kinerja yang menjadi dasar dalam melakukan pemantauan dan evaluasi. Setiap target kinerja diarahkan untuk mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2025, BPKAD Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara optimal serta memastikan setiap sumber daya yang digunakan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah.



Rencana Kinerja Tahun 2025 dapat di lihat pada table sebagai berikut;

Tabel

RENCANA KINERJA TAHUN 2025

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	78,00 %
	Terwujudnya Pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP



2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat komitmen dan kesepakatan kinerja antara pimpinan BPKAD dengan Bupati Kutai Timur dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja ini menjadi dasar dalam pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja BPKAD selama Tahun Anggaran 2025.

Perjanjian Kinerja juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan BPKAD memiliki keterkaitan yang jelas antara sasaran, indikator kinerja, target, program, kegiatan, serta dukungan anggaran. Dengan demikian, seluruh sumber daya yang tersedia dapat diarahkan untuk mencapai sasaran strategis perangkat daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Perjanjian Kinerja adalah Lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Berikut adalah poin-poin penting mengenai tujuan dari perjanjian kinerja;

1. **Wujud Komitmen:** Menjadi tanda bukti nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi mandat untuk melaksanakan tugas dengan baik.
2. **Tolok Ukur Evaluasi:** Menciptakan ukuran kinerja yang jelas untuk menilai keberhasilan atau kegagalan target kerja
3. **Dasar Penilaian:** Menjadi acuan dalam melakukan monitoring, supervisi, serta evaluasi kinerja pegawai maupun organisasi
4. **Dasar Penghargaan dan Sanksi:** Digunakan sebagai acuan dalam pemberian *reward* (penghargaan) atau *punishment* (sanksi) atas pencapaian target
5. **Penyelarasan Target:** Membantu menyelaraskan sasaran kerja individu (seperti Sasaran Kinerja Pegawai/SKP) dengan tujuan strategis organisasi

Perjanjian Kinerja disusun oleh setiap instansi pemerintah setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), paling lambat satu bulan setelah dokumen



anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan, serta sumber daya yang tersedia.

Melalui Perjanjian Kinerja, diharapkan terwujud komitmen yang kuat dari seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja, sehingga setiap sumber daya yang digunakan dapat memberikan hasil yang optimal.

Kinerja yang diperjanjikan tidak hanya terbatas pada kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, tetapi juga mencakup kinerja atau *outcome* yang seharusnya terwujud sebagai dampak dari pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan dapat mencerminkan kesinambungan hasil pembangunan dan pencapaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Timur menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang harus dicapai selama Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi. Hasil pencapaian target tersebut selanjutnya dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai pada akhir Tahun Anggaran 2025.

Adapun Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 disajikan pada **Lampiran I**. Selanjutnya, **Target dan Realisasi Sasaran dan**



Indikator Kinerja BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 serta Pengukuran Kinerja Tahun 2025 disajikan pada **Lampiran II** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati Kutai Timur dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawabannya melalui Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi merupakan gambaran tingkat keberhasilan BPKAD dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja, perkembangan capaian dari tahun ke tahun, serta pencapaian target jangka menengah. Selain itu, dilakukan analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, serta program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD pada tahun berjalan telah mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Capaian tersebut tercermin dari tingkat realisasi indikator kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja dapat direalisasikan sesuai target, bahkan pada beberapa indikator terdapat capaian yang melebihi target. Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum mencapai target sehingga memerlukan langkah perbaikan dan penguatan pada periode berikutnya.



Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun ini

Berdasarkan hasil pengukuran Dalam capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan masing-masing 1 (satu) indikator kinerja utama. Hasil perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 3.1.1:

Tabel 3.1.1 Perbandingan Antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=7/6*100
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	78.00%	78.00%*	
	Terwujudnya Pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP*	

Pada table di atas dapat di simpulkan pada sasaran “Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas”, indikator kinerja yang digunakan adalah Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan satuan



persentase. Target yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar **78,00%**, sedangkan realisasi yang tercantum dalam pengukuran kinerja masih sebesar **78,00%*** dan belum dapat dinyatakan sebagai hasil penilaian akhir. Hal tersebut disebabkan penilaian IPKD dilakukan pada bulan November–Desember Tahun 2026, sehingga hasil penilaian final belum tersedia pada saat penyusunan laporan ini.

Selanjutnya, pada sasaran “Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan”, indikator kinerja yang digunakan adalah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan dengan satuan opini. Target yang ditetapkan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan pada tabel pengukuran kinerja tercantum realisasi WTP*. Dengan demikian, berdasarkan target yang telah ditetapkan, capaian yang diharapkan adalah mempertahankan opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Dengan demikian, pengukuran kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan target kinerja yang berorientasi pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun, untuk indikator IPKD dan opini BPK, hasil penilaian akhir masih mengikuti jadwal dan tahapan penilaian/pemeriksaan masing-masing.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perkembangan capaian kinerja BPKAD Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat dengan membandingkan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.2.:



Tabel 3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
				Realisasi %	Realisasi %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	62.35%	79.66%	78.00%	%	%
	Terwujudnya Pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP*	WTP*	WTP*

Berdasarkan data yang disajikan di atas, perkembangan kinerja secara umum meningkat yaitu:

- Pada indikator **Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**, realisasi Tahun 2023 sebesar **62,35%**, kemudian meningkat menjadi **79,66% pada Tahun 2024**. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pada Tahun 2025, target IPKD ditetapkan sebesar **78,00%**, sedangkan hasil realisasi dan persentase capaian akhir belum dapat ditetapkan karena proses penilaian IPKD dilaksanakan pada bulan November–Desember Tahun 2026. Oleh karena itu, perkembangan



kinerja IPKD Tahun 2025 belum dapat dibandingkan secara final dengan realisasi Tahun 2024.

- Sementara itu, indikator **Opini BPK terhadap Laporan Keuangan** menunjukkan konsistensi capaian yang baik. Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Untuk Tahun 2025, target yang ditetapkan juga berupa opini WTP, sedangkan hasil akhir opini masih menunggu penyelesaian tahapan pemeriksaan BPK dan pengumuman hasil pemeriksaan pada Tahun 2026.

Secara umum, perkembangan kinerja BPKAD Kabupaten Kutai Timur menunjukkan kecenderungan positif. Hal ini tercermin dari peningkatan nilai IPKD dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 serta kemampuan mempertahankan opini WTP pada Tahun 2023 dan Tahun 2024. Untuk Tahun 2025, capaian akhir kedua indikator masih menunggu hasil penilaian IPKD dan pemeriksaan BPK sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.3 realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah Renstra	Tahun 2025			Target Jangka Menengah
					Target	Realisasi Capaian	Persentase Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)7/6*100	(9)7/5*100
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	78.00%	78.00%			



	berkualitas							
	Terwujudnya Pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP*	WTP	

Berdasarkan tabel 3.1.3 Pada sasaran Dengan demikian, berdasarkan perbandingan terhadap target jangka menengah Renstra, BPKAD Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk indikator IPKD, evaluasi pencapaian secara definitif masih menunggu hasil penilaian, sedangkan untuk indikator opini BPK, target yang ditetapkan adalah mempertahankan opini WTP., indikator yang digunakan adalah Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Target yang ditetapkan untuk Tahun 2025 sebesar **78,00%**, dengan target jangka menengah Renstra sebesar **78,00%**. Namun, realisasi capaian akhir belum dapat ditentukan karena hasil penilaian IPKD belum tersedia dan pelaksanaan penilaian dijadwalkan pada bulan November–Desember Tahun 2026. Oleh karena itu, persentase capaian terhadap target Tahun 2025 maupun terhadap target jangka menengah belum dapat dihitung secara final.

Pada sasaran “Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan”, indikator yang digunakan adalah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan. Target Tahun 2025 dan target jangka menengah ditetapkan berupa opini WTP. Dalam tabel, realisasi Tahun 2025 tercantum WTP*, dengan catatan bahwa hasil akhir masih mengikuti proses pemeriksaan BPK.

Dengan demikian, berdasarkan perbandingan terhadap target jangka menengah Renstra, BPKAD Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk indikator IPKD, evaluasi pencapaian secara definitif masih menunggu hasil penilaian,



sedangkan untuk indikator opini BPK, target yang ditetapkan adalah mempertahankan opini WTP.



3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.1.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Standar Nasional (Jika ada)	Hasil Perbandingan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	78.00%* * (masih belum Penilaian)	Tidak terdapat target opini nasional yang ditetapkan dalam bentuk persentase.	Memenuhi/Baik
	Terwujudnya Pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP* * (Tahapan Audit BPK)	Tidak terdapat target opini nasional yang ditetapkan secara kuantitatif.	Memenuhi/Baik

Berdasarkan Tabel 3.1.4 dapat di simpulkan:

- indikator Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun 2025 memiliki realisasi kinerja sebesar **78,00%***. Untuk indikator ini, tidak terdapat standar nasional berupa target opini yang ditetapkan dalam bentuk persentase, sehingga perbandingan secara kuantitatif dengan standar nasional tidak dapat dilakukan. Namun demikian, berdasarkan hasil yang tercantum pada tabel, capaian tersebut dinilai Memenuhi/Baik..
- Sementara itu, indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pada Tahun 2025 memperoleh realisasi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Tidak terdapat target nasional yang ditetapkan secara kuantitatif dalam bentuk persentase untuk indikator opini tersebut. Meskipun demikian, opini WTP merupakan capaian yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah memenuhi kriteria kewajaran berdasarkan pemeriksaan BPK.



3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, indikator Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah **78.00%*** dan indikator kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* dengan tingkat capaian sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian ke dua indikator dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. **Komitmen pimpinan dan perangkat daerah;** dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Peningkatan koordinasi dan sinergi;** antara BPKAD dengan seluruh perangkat daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
3. **Peningkatan kualitas penatausahaan dan pelaporan keuangan,** termasuk rekonsiliasi data secara berkala antara perangkat daerah dengan BPKAD.
4. **Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala;** terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga permasalahan yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti.
5. **Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);** melalui inventarisasi, penatausahaan, rekonsiliasi, dan pemutakhiran data aset.
6. **Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK;** yang dilakukan secara berkelanjutan oleh perangkat daerah terkait.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mempertahankan kualitas laporan keuangan. Aspek yang perlu terus diperkuat meliputi konsistensi dan validitas data keuangan dan aset, ketepatan waktu



penyampaian dokumen, tertib administrasi Barang Milik Daerah, serta penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.

Sebagai langkah perbaikan, BPKAD Kabupaten Kutai Timur perlu terus meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada perangkat daerah, melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi data secara berkala, memperkuat pengawasan terhadap penatausahaan keuangan dan BMD, mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan upaya tersebut, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Timur dapat terus ditingkatkan, sehingga target peningkatan nilai IPKD dapat tercapai dan opini WTP dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada table berikut:

Tabel 3.1.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Idikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Kinerja Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	78.00%*	81,20%	18,80%
	Terwujudnya Pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP*	87,13%	12,87%

- Pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), capaian kinerja mencapai 78.00 persen, sementara realisasi anggaran sebesar 81,20 persen. Selisih antara capaian kinerja dan serapan anggaran menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 18,80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang melampaui target dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang tidak



sepenuhnya terserap, sehingga mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.

- Sementara itu, pada sasaran terwujudnya tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, target kinerja yang ditetapkan juga berupa opini WTP dan realisasi mencapai WTP, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 87,13%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa target kinerja berhasil dicapai dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 87,13% Persen, sehingga tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar kurang lebih 12,87% dari pagu yang tersedia, Kondisi ini menunjukkan bahwa target kinerja dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang relatif optimal dan tetap menghasilkan efisiensi

Secara keseluruhan, kedua sasaran BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 berhasil mencapai target kinerja sebesar 100%, sedangkan realisasi anggaran berada pada kisaran 81,20% sampai dengan 87,13%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat penyerapan anggaran. Dengan capaian kinerja yang tetap mencapai target meskipun anggaran tidak terserap seluruhnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan cukup efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD.

Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dapat menjadi indikasi adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, namun tetap perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa rendahnya realisasi anggaran bukan disebabkan oleh adanya kegiatan yang tidak terlaksana atau output yang tidak tercapai. Evaluasi tersebut penting sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya agar alokasi anggaran semakin tepat, efektif, efisien, dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.

Dengan demikian, hubungan antara pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran Tahun 2025 menunjukkan bahwa target kinerja BPKAD Kabupaten Kutai Timur telah tercapai secara optimal, sementara penggunaan anggaran masih dapat



dikendalikan sehingga menghasilkan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk menunjang peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan.

Pada sasaran terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas, program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja antara lain meliputi kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, rekonsiliasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan kegiatan tersebut memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam memastikan proses pengelolaan keuangan dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi data keuangan juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian indikator IPKD. Melalui rekonsiliasi secara berkala, perbedaan data antara perangkat daerah dengan BPKAD dapat segera diidentifikasi dan dilakukan perbaikan. Selain itu, kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada perangkat daerah turut mendukung peningkatan pemahaman serta kepatuhan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pada sasaran terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan, program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain berkaitan dengan penatausahaan, inventarisasi, rekonsiliasi, pemutakhiran data, pengamanan, pemanfaatan, serta monitoring dan



evaluasi Barang Milik Daerah. Kegiatan tersebut berperan dalam meningkatkan tertib administrasi aset dan memastikan kesesuaian antara data aset dengan kondisi serta dokumen pendukung yang tersedia. Pengelolaan BMD yang tertib juga menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

Selanjutnya, kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, sehingga permasalahan yang ditemukan dapat segera diselesaikan dan tidak berulang pada periode berikutnya.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, secara umum kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan dukungan terhadap pencapaian sasaran strategis BPKAD. Hal tersebut tercermin dari realisasi anggaran yang berada pada kisaran 81,20% sampai dengan 87,13%, serta tetap terlaksananya kegiatan yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk indikator IPKD, target yang ditetapkan sebesar **78,00%**, namun hasil penilaian akhir belum tersedia karena proses penilaian dilakukan pada bulan November–Desember Tahun 2026. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian target IPKD belum dapat dinilai secara definitif pada saat penyusunan laporan ini.

Sementara itu, untuk indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan, target yang ditetapkan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah memperoleh opini WTP pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, sehingga program dan kegiatan pengelolaan keuangan serta BMD pada Tahun 2025 diarahkan untuk mempertahankan capaian tersebut. Namun, hasil akhir opini Tahun 2025 masih menunggu penyelesaian tahapan pemeriksaan BPK.

Adapun beberapa faktor yang berpotensi memengaruhi pencapaian kinerja antara lain ketepatan waktu penyampaian data dan dokumen dari perangkat daerah, kualitas dan konsistensi data keuangan dan aset, tertib administrasi BMD, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta kapasitas sumber daya manusia



dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Faktor-faktor tersebut perlu terus diperhatikan karena dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan maupun hasil penilaian IPKD.

Sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja, BPKAD Kabupaten Kutai Timur perlu terus memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah, meningkatkan pembinaan dan pendampingan, melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi secara berkala, meningkatkan kualitas pengelolaan dan penatausahaan BMD, serta mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 pada prinsipnya telah diarahkan secara langsung untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan. Keberlanjutan pelaksanaan program tersebut, disertai dengan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi, diharapkan dapat mendukung tercapainya target IPKD serta mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan Target dan realisasi dari indikator kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 yang akan dilaksanakan dan yang telah direalisasikan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Untuk Taget dan Realisasi indikator kinerja BPKAD Kab.Kutai Timur Tahun 2025 Kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut;



Tabel B.1 Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan TA.2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	2	2	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	3	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat	Dokumen	1	1	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Laporan	7	7	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	200	200	100%



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut PNS dan TK2D	Paket	-	-	,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	2	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	3	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	34	34	100%



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	35	35	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	-	,00%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA / PPAS	Dokumen	2	2	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA / PPAS Perubahan	Dokumen	-	-	,00%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	110	110	100%
Koordinasi, Penyusunan dan	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	-	-	,00%



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja
Verifikasi Perubahan RKA-SKPD					
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	110	110	100%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	-	-	,00%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	100%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	-	-	,00%
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	-	-	,00%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	180	180	100%
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	300	300	100%
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	4	4	100%
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas,	Dokumen	20	20	100%



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK))	Laporan	4	4	100%
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	-	-	,00%
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	Dokumen	2	2	100%



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja
SP2D dengan Instansi Terkait	Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		2	2	100%
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	-	-	,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					
Koordinasi Implementasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	250	250	100%
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	586	586	100%
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	-	-	,00%
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	Dokumen	58	58	100%



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	-	-	,00%
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	-	-	,00%
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (20 Lembaga)	Lembaga	-	-	,00%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	1	100%
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	3	3	100%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
Pengelolaan Barang Milik Daerah					
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	1	100%
Penyusunan Perencanaan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	100%



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja
Kebutuhan Barang Milik Daerah					
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100%
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	57	57	100%
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100%
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100%
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	10	10	100%
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100%
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	-	-	,00%

Berdasarkan Tabel B.1 Dapat disimpulkan;

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana tercantum dalam tabel telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh capaian kinerja pada tingkat kegiatan dan subkegiatan yang menunjukkan realisasi sesuai bahkan melampaui indikator yang direncanakan. Dengan demikian, secara keseluruhan kinerja pada level program, kegiatan, dan subkegiatan dapat dinyatakan telah memenuhi target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, serta mencerminkan pelaksanaan yang efektif dan terukur.



C. REALISASI ANGGARAN BPKAD KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025

Realisasi Anggaran BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Informasi ini memberikan gambaran mengenai tingkat penyerapan anggaran, efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, serta keterkaitannya dengan pencapaian kinerja dalam mendukung sasaran strategis organisasi.

Realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 sebesar Rp 1.393.264.640.521,00 atau terserap 95,76% dibandingkan dengan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 1.495.313.377.123,00 atau terserap 80,78%. Rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel B.2 Pagu Anggaran dan Realisasi Bpkad Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Kode. Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Apbd Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Apbd Tahun 2025 (Rp)	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	130.528.255.253,-	98.253.759.472,-	75,27
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	932.335.717,-	920.801.817,-	98,76
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83.619.000,-	82.116.000,-	98,20
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	83.619.000,-	83.249.000,-	99,56
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	74.328.000,-	73.396.600,-	98,75
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74.328.000,-	71.972.000,-	96,83



Kode. Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Apbd Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Apbd Tahun 2025 (Rp)	%
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.037.000,-	62.697.500,-	96,40
5.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	551.404.717,-	547.370.717,-	99,27
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	117.081.476.660,-	87.043.341.306,-	74,34
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	115.857.204.460,-	86.345.522.706,-	74,54
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	764.850.000,-	244.080.000,-	31,91
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	107.003.000,-	101.778.600,-	95,12
5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	68.016.500,-	67.986.000,-	99,96
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	284.402.700,-	283.974.000,-	99,85
5.02..01.2.065	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	,-	,-	
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	,-	,-	
5.02.01.2.05.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	,-	,-	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.700.902.590,-	2.088.379.852,-	56,43
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	566.913.885,-	501.523.072,-	88,47
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	395.783.705,-	358.856.000,-	90,67
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	179.212.000,-	80.528.000,-	44,93



Kode. Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Apbd Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Apbd Tahun 2025 (Rp)	%
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.558.993.000,-	1.147.472.780,-	44,84
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.678.480.000,-	6.223.130.089,-	93,18
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.678.480.000,-	6.223.130.089,-	93,18
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.823.000.286,-	1.716.520.189,-	94,16
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	432.110.000,-	366.380.901,-	84,79
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.390.890.286,-	1.350.139.288,-	97,07
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.060.000,-	261.586.219,-	83,83
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	312.060.000,-	261.586.219,-	83,83
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	,-	,-	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.339.644.395.983,-	1.087.826.399.642,-	81,20
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.880.496.000,-	1.259.593.616,-	43,73
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	1.015.432.000,-	644.618095,-	63,48
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	,-	,-	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	811.582.500,-	141.164.233,-	17,39



Kode. Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Apbd Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Apbd Tahun 2025 (Rp)	%
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	,-	,-	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	333.876.000,-	107.741.220,-	32,27
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	,-	,-	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	719.605.500,-	366.070.068,-	50,87
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	,-	,-	
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	,-	,-	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.419.558.110,-	2.041.786.081,-	84,39
5.02.02.2.01.001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	337.657.000,-	294.768.617,-	87,30
5.02.02.2.01.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	250.285.000,-	223.727.000,-	89,39
5.02.02.2.01.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	189.036.000,-	151.896.000,-	80,35
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	85.150.610,-	68.910.750,-	80,93
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga	147.972.000,-	136.782.652,-	92,44



Kode. Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Apbd Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Apbd Tahun 2025 (Rp)	%
	Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	330.031.000,-	309.194.164,-	93,69
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	,-	,-	
5.02.02.2.01.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	347.621.000,-	326.857.102,-	94,03
5.02.02.2.01.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	731.805.500,-	529.649.796,-	72,38
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	,-	,-	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.877.589.000,-	1.913.353.726,-	66,49
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Implementasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1.411.246.000,-	568.378.654,-	40,27
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,	806.994.000,-	736.064.964,-	91,21



Kode. Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Apbd Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Apbd Tahun 2025 (Rp)	%
	Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban			
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	,-	,-	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	432.734.000,-	402.158.600,-	92,93
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	226.611.000,-	206.751.508,-	91,24
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	,-	,-	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	,-	,-	
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	,-	,-	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.331.466.752.873,-	1.082.611.666.219,-	81,31
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1.307.558.102.072,-	1.075.824.437.218,-	82,28
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	23.908.650.801,-	6.787.229.001,-	28,39



Kode. Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Apbd Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Apbd Tahun 2025 (Rp)	%
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	25.140.725.887,-	21.905.646.496,-	87,13
5.02.02.3.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah	25.140.725.887,-	21.905.646.496,-	87,13
5.02.02.3.02.0001	Penyusunan Standar Harga	1.015.262.600,-	958.050.600,-	94,36
5.02.02.3.02.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	145.268.000,-	133.293.812,-	91,76
5.02.02.3.02.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	136.404.000,-	100.030.000,-	73,33
5.02.02.3.02.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	2.546.720.000,-	1.401.320.000,-	55,02
5.02.02.3.02.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	20.426.159.000,-	18.564.593.758,-	90,89
5.02.02.3.02.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	169.455.000,-	153.018.963,-	90,30
5.02.02.3.02.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	451.028.287,-	433.223.363,-	96,05
5.02.02.3.02.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	250.429.000,-	162.116.000,-	64,74
5.02.02.3.02.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	,-	,-	

Pada Tabel tersebut dapat disimpulkan dari Pagu anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 sebesar Rp 1.495.313.377.123,00 telah Terealisasi Sebesar Rp. 1.207.985.805.610,00 jika di persentasekan terserap 80,78%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki anggaran sebesar Rp130.528.255.253,00 dengan realisasi sebesar Rp98.253.759.472,00 atau **75,27%**. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan komponen



terbesar dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp117.081.476.660,00 dan realisasi Rp87.043.341.306,00 atau **74,34%**. Anggaran terbesar digunakan untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN, serta digunakan sebagai penunjang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ASN se Kutai Timur.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan program dengan alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp1.339.644.395.983,00 dengan realisasi sebesar Rp1.087.826.399.642,00 atau 81,20%, dimana Pada program tersebut terdapat sub.Kegiatan yang menunjang Dana Desa dan juga dana Darurat Mendesak.

Adapun Program Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki anggaran sebesar Rp25.140.725.887,00 dengan realisasi sebesar Rp21.905.646.496,00 atau 87,13%. Pada program ini, penyusunan standar harga mencapai realisasi 94,36%, penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebesar 91,76%, pengamanan barang milik daerah sebesar 90,89%, penilaian barang milik daerah sebesar 90,30%, serta optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sebesar 96,05%. Namun, inventarisasi barang milik daerah hanya terealisasi 55,02%, sedangkan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah sebesar 64,74%.

Rendahnya realisasi pada beberapa sub.kegiatan terutama terdapat pada penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, koordinasi dan verifikasi RKA-SKPD, pengelolaan dana darurat dan mendesak, serta inventarisasi barang milik daerah. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam evaluasi pelaksanaan anggaran agar perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan penyerapan anggaran pada periode berikutnya dapat berjalan lebih optimal.



BAB IV

PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Secara umum, capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan hasil yang baik dan terkendali. Hal ini tercermin dari tercapainya sebagian besar indikator kinerja utama yang mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan fungsi pengelolaan anggaran, penatausahaan keuangan, serta pengelolaan dan penatausahaan aset daerah telah berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan dan kebijakan daerah. Dukungan sistem pengendalian internal serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang memerlukan peningkatan, terutama terkait optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan kualitas data dan pelaporan, serta percepatan tindak lanjut hasil pengawasan. Berbagai upaya perbaikan telah dan akan terus dilakukan melalui penguatan perencanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Ke depan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah guna mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Secara total pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur mencapai **80,78%**



RENCANA TINDAK

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk tahun-

tahun ke depannya, maka diperlukan sejumlah langkah-langkah yang dirumuskan antara lain:

1. Melakukan telaah dan revisi Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah jika diperlukan, menyesuaikan dengan kondisi terkini dan RPJMD Kabupaten Kutai Timur;
2. Menyusun Perjanjian Kinerja tahun-tahun berikutnya menyelaraskan dengan Renstra dan RPJMD;
3. Melakukan kajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah di BPKAD maupun seluruh pengelola keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, baik dalam bentuk bimbingan teknis, Pendidikan dan pelatihan (Diklat), *workshop*, Program Pelatihan Mandiri (PPM), ataupun bentuk pelatihan lainnya

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TA.2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ade Achmad Yulkafilah, S.T., M.M**
Pangkat : Pembina Tk.I / IVb
NIP : 19750717 200701 1 014
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. Ardiansyah Sulaiman M.Si.**

Jabatan : Bupati Kutai Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Kutai Timur

ARDIANSYAH SULAIMAN

Pihak Pertama,
Kepala Badan

Ade Achmad Yulkafilah, S.T., M.M

Pembina Tk.I / IVb
NIP. 19750717 200701 1 014

Rup 488



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Nama	Jabatan	Paraf
RIZALI HADI	SEKRETARIS DAERAH	
SUDIRMAN LATIF	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
ADE ACHMAD YULKAFILAH	KEPALA BADAN	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	78%
2	Terwujudnya Pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 130.528.255.253,-	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 1.339.644.395.983,-	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	RP. 25.140.725.887,-	
JUMLAH		Rp. 1.495.313.377.123,-	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Kutai Timur


ARDIANSYAH SULAIMAN

Pihak Pertama,
Kepala Badan


Ade Achmad Yulkafilah, S.T., M.M
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19750717 200701 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj.Darmawati Idrus, S.T.,M.M.
Pangkat : Pembina / IVa
NIP : 19740709 200604 2 011
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ade Achmad Yulkafilah,S.T.,M.M
Pangkat : Pembina Tk. I / IVb
NIP : 19750717 200701 1 014
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Ade Achmad Yulkafilah,S.T.,M.M

Pembina Tk. I / IVb

NIP. 19750717 200701 1 014

Pihak Pertama

Hj.Darmawati Idrus, S.T.,M.M.

Pembina / IV a

NIP. 19740709 200604 2 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 2.419.558.110,-	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Ade Achmad Yulkafilah, S.T., M.M

Pembina Tk.I / IVb

NIP. 19750717 200701 1 014

Pihak Pertama

Hj. Darmawati Idrus, S.T., M.M.

Pembina / IV a

NIP. 19740709 200604 2 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Galuh Ajeng Permata Sari.S.Sos.,M.A.P
Pangkat : Penata TK.I /IIId
NIP : 19770811 200701 2 015
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Pengelola Kas Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Hj. Darmawati Idrus, S.T., MM
Pangkat : Pembina / IVa
NIP : 19780423 200212 1 004
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Hj. Darmawati Idrus, S.T., MM
Pembina / IVa
NIP. 19780423 200212 1 004

Pihak Pertama

Galuh Ajeng Permata Sari.S.Sos.,M.A.P
Penata TK.I /IIId
NIP. 19770811 200701 2 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	180 Dokumen
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	300 Dokumen
3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4 Dokumen
4	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	20 Dokumen
5	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan	4 Laporan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

		Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK))	
7	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
8	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen
9	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen
10	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3 Laporan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp. 337.657.000,-	
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp. 250.285.000,-	
3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Rp. 189.036.000,-	
4	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp. 85.150.610,-	
5	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rp. 147.972.000,-	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp. 330.031.000,-	
7	Koordinasi Implementasi Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Implementasi Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Rp. 0,-	
8	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp. 347.621.000,-	
9	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Rp. 731.805.500,-	



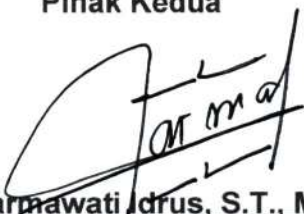
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

10	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. ,-	
----	--	--------	--

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp. 1.306.058.102.072,-	
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp. 25.408.650.801,-	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua


Hj. Darmawati Idrus, S.T., MM
Pembina / IVa
NIP. 19780423 200212 1 004

Pihak Pertama


Galuh Ajeng Permata Sari.S.Sos.,M.A.P
Penata TK.I /IId
NIP. 19770811 200701 2 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Rahman, SE., M.M.
Pangkat : Pembina / IVa
NIP : 19680806 1995603 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ade Achmad Yulkafilah, S.T., M.M.
Pangkat : Pembina Tk.I / IVb
NIP : 19750717 200701 1 014
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Ade Achmad Yulkafilah, S.T., M.M.
Pembina Tk.I / IVb.
NIP. 19750717 200701 1 014

Pihak Pertama

Abdul Rahman, SE., M.M.
Pembina / IVa
NIP. 19680806 1995603 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksanannya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	WTP

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 25.140.725.887,-	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Ade Achmad Yulkafilah, S.T., M.M.
Pembina Tk.I / IVb.
NIP. 19750717 200701 1 014

Pihak Pertama

Abdul Rahman, SE., M.M.
Pembina / IVa
NIP. 19680806 1995603 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanu Tri Sugiarto, S.E., M.A.P
Pangkat : Penata / IIIc
NIP : 19830514 200701 2 004
Jabatan : Kepala.Sub.Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Abdul Rahman, SE., M.M
Pangkat : 19680806 1995603 1 003
NIP : Pembina / IVa
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua


Abdul Rahman, SE., M.M.
Pembina / IVa
NIP. 19680806 1995603 1 003

Pihak Pertama


Yanu Tri Sugiarto, S.E., M.A.P
Penata / IIIc
NIP 19830514 200701 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan
4	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	57 Laporan
5	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan
6	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Standar Harga	Rp. 1.015.262.600,-	
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp. 145.268.000,-	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp. 136.404.000,-	
4	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp. 2.546.720.000,-	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

5	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp. 20.426.159.000,-	
6	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp. 250.429.000,-	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Abdul Rahman.S.E.,M.M.
Pembina / IVa
NIP. 19680806 1995603 1 003

Pihak Pertama

Yanu Tri Sugiarto,S.E.,M.A.P
Penata / IIIc
NIP 19830514 200701 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Sawitri,S.Sos.,M.E
Pangkat : Penata /IIIc
NIP : 19820612 200801 2 028
Jabatan : Kepala Sub.Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Abdul Rahman,SE.,M.M
Pangkat : Pembina / IVa
NIP : 19680806 1995603 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Abdul Rahman,SE.,M.M.

Pembina / IVa

NIP. 19680806 1995603 1 003


Dewi Sawitri,S.Sos.,M.E.

Penata / IIIc

NIP. 19820612 200801 2 028



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan
2	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10 Dokumen
3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penilaian Barang Milik Daerah	Rp. 169.455.000,-	
2	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp. 451.028.287,-	
3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. ,-	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua


Abdul Rahman.S.E.,M.M.
Pembina / IVa
NIP. 19680806 1995603 1 003

Pihak Pertama


Dewi Sawitri,S.Sos.,M.E.
Penata / IIIc
NIP. 19820612 200801 2 028



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Rahman,SE.,M.M
Pangkat : Pembina / IVa
NIP : 19680806 1995603 1 003
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Anggaran

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ade Achmad Yulkafilah,S.T., M.M.
Pangkat : Pembina Tk.I / IVb
NIP : 19750717 200701 1 014
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua


Ade Achmad Yulkafilah,S.T., M.M.
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19750717 200701 1 014

Pihak Pertama


Abdul Rahman,SE.,M.M.
Pembina / IVa
NIP. 19680806 1995603 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp. 2.880.496.000,-	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Ade Achmad Yulkafilah, S.T., M.M.

Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19750717 200701 1 014

Pihak Pertama

Abdul Rahman, SE., M.M.

Pembina / IVa
NIP. 19680806 1995603 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajar Hidayat,S.E
Pangkat : Penata /IIIc
NIP : 19791122 200801 1 011
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Abdul Rahman,SE,.M.M
Pangkat : 19680806 1995603 1 003
NIP : Pembina / IVa
Jabatan : Plt.Kepala Bidang Anggaran

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua


Abdul Rahman,SE,.M.M.
Pembina / IVa
NIP. 19680806 1995603 1 003

Pihak Pertama


Fajar Hidayat,S.E
Penata / IIIc
NIP 19791122 200801 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	110 Dokumen
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	-
5	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp. 1.015.432.000,-	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp. 0,-	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp. 811.582.500,-	
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp. 0,-	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

5	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp.	0,-	
---	--	-----	-----	--

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Abdul Rahman.SE.,M.M.

Pembina / IVa

NIP. 19680806 1995603 1 003

Pihak Pertama

Fajar Hidayat,S.E

Penata / IIIc

NIP 19791122 200801 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Emmy Farida Aryani, S.E., M.E.
Pangkat : Penata TK.I / III d
NIP : 19870406 201101 2 007
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Anggaran II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Abdul Rahman, SE., M.M
Pangkat : Pembina / IVa
NIP : 19680806 1995603 1 003
Jabatan : Plt.Kepala Bidang Anggaran

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua


Abdul Rahman, SE., M.M.
Pembina / IVa
NIP. 19680806 1995603 1 003

Pihak Pertama


Hj. Emmy Farida Aryani, S.E., M.E.
Penata TK.I / III d
NIP. 19870406 201101 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	57 Dokumen
2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerahtentang Perubahan APBDdan Peraturan KepalaDaerah tentangPenjabaran PerubahanAPBD	-

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	RP. 333.876.000,-	
2	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp. 0,-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	RP. 719.605.500,-	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp. 0,-	
---	---	---------	--

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Abdul Rahman.S.E.,M.M.
Pembina / IVa
NIP. 19680806 1995603 1 003

Pihak Pertama

Hj. Emmy Farida Aryani, S.E., M.E.
Penata TK.I / IIId
NIP. 19870406 201101 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aji Salehudin, S.E.,M.E.
Pangkat : Pembina / IVa
NIP : 19780423 200212 1 004
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ade Achmad Yulkafilah, S.T., M.M.
Pangkat : Pembina Tk. I / IVb
NIP : 19750717 200701 1 014
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Ade Achmad Yulkafilah, S.T., M.M.
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19750717 200701 1 014

Pihak Pertama

Aji Salehudin, S.E., M.E.
Pembina / IVa
NIP. 19780423 200212 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 932.335.717,-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 117.081.476.660,-	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 6.678.480.000,-	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.823.000.286,-	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 312.060.000,-	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Ade Achmad Yulkafilah, S.T., M.M.

Pembina Tk.I / IVb

NIP. 19750717 200701 1 014

Pihak Pertama

Aji Salehudin, S.E., M.E.

Pembina / IV a

NIP. 19780423 200212 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Ardaniansyah Darlan, S.T., M.A.P
Pangkat : Penata TK.I / IIIId
NIP : 19811215 200901 1 005
Jabatan : Kepala Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Aji Salehudin, S.E., M.E.
Pangkat : Pembina / IVa
NIP : 19780423 200212 1 004
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Aji Salehudin, S.E., M.E.
Pembina / IVa
NIP. 19780423 200212 1 004

Pihak Pertama

H. Ardaniansyah Darlan, S.T., M.A.P
Penata TK.I / IIIId
NIP 19811215 200901 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	34 Unit

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35 Unit
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 115.857.204.460,-	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 764.850.000,-	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 107.003.000,-	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 68.016.500,-	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 284.402.700,-	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 0,-	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 0,-	

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 566.913.885,-	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 395.783.705,-	
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 179.212.000,-	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 2.558.993.000,-	

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 6.678.480.000,-	

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 432.110.000,-	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.390.890.286,-	
---	---------------------------------------	---------------------	--

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 312.060.000,-	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 0,-	

Pihak Kedua

Aji Salehudin, S.E., M.E.

Pembina / IVa

NIP. 19780423 200212 1 004

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Pertama

H. Ardaniansyah Darlan, S.T., M.A.P

Penata TK.I / IIId

NIP 19811215 200901 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andra Nurhadi Putra, S.E., M.A.P
Pangkat : Penata TK.I / III d
NIP : 19841013 200701 1 003
Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Aji Salehudin, S.E., M.E.
Pangkat : Pembina / IV a
NIP : 19780423 200212 1 004
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Aji Salehudin, S.E., M.E.
Pembina / IV a
NIP. 19780423 200212 1 004

Pihak Pertama

Andra Nurhadi Putra, S.E., M.A.P
Penata TK.I / III d
NIP. 19841013 200701 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat	1 Laporan
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	7 Dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 83.619.000,-	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 83.619.000,-	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 74.328.000,-	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 74.328.000,-	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 65.037.000,-	
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Rp. 551.404.717,-	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Aji Salehudin, S.E.,M.E.
Pembina / IV a
NIP. 19780423 200212 1 004

Pihak Pertama

Andra Nuhadi Putra, S.E.,M.A.P
Penata TK.I / III d
NIP. 19841013 200701 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.M.Adnan,S.E.,M.Si
Pangkat : Pembina / IVa
NIP : 19761226 200701 1 010
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ade Achmad Yulkafilah,S.T., M.M.
Pangkat : Pembina Tk.I / IVb
NIP : 19750717 200701 1 014
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua


Ade Achmad Yulkafilah,S.T., M.M.
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19750717 200701 1 014

Pihak Pertama


H.M.Adnan,S.E.,M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19761226 200701 1 010



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp. 2.877.589.000,-	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Ade Achmad Yulkafilah, S.T., M.M.
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19750717 200701 1 014

Pihak Pertama

H.M. Adnan, S.E., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19761226 200701 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusdiansyah, S.E., M.Si
Pangkat : Pembina / IVa
NIP : 19820507 200604 1 013
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Penerimaan dan Belanja

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H.M.Adnan,S.E.,.M.Si
Pangkat : Pembina / IVa
NIP : 19761226 200701 1 010
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi

Selaku atasan langsung pihak pertama

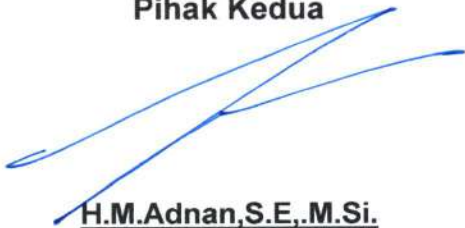
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua



H.M.Adnan,S.E.,M.Si.
Pembina / IVa
NIP. 19761226 200701 1 010

Pihak Pertama



Rusdiansyah, S.E., M.Si
Pembina / IVa
NIP 19820507 200604 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Koordinasi Implementasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	250 Laporan
2	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Rp. 1.411.246.000,-	
2	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 0,-	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua


H.M. Adnan, S.E., M.Si.
Pembina / IVa
NIP. 19761226 200701 1 010

Pihak Pertama


Rusdiansyah, S.E., M.Si
Pembina / IVa
NIP 19820507 200604 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eni Widya Astuti, S.E
Pangkat : Penata TK.I / III d
NIP : 19830810 201101 2 005
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Laporan Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H.M.Adnan,S.E,.M.Si
Pangkat : Pembina / IVa
NIP : 19761226 200701 1 010
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi
Selaku atasan langsung pihak pertama

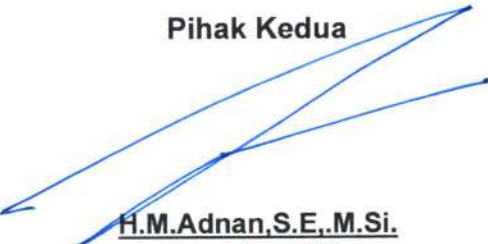
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua


H.M.Adnan,S.E,.M.Si.
Pembina / IVa
NIP. 19761226 200701 1 010

Pihak Pertama


Eni Widya Astuti, S.E.
Penata TK.I / III d
NIP. 19830810 201101 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	586 Dokumen
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	58 Dokumen
5	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
6	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rp. 806.994.000,-	

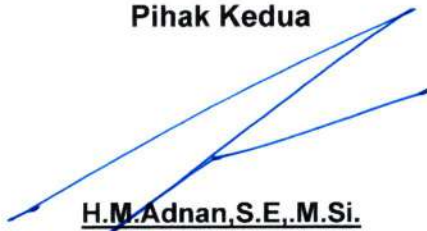


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		
3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	RP. 432.738.000,-	
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp. 226.611.000,-	
5	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp. 0,-	
6	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Rp. 0,-	

Sangatta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua


H.M. Adnan, S.E., M.Si.
Pembina / IVa
NIP. 19761226 200701 1 010

Pihak Pertama


Eni Widya Astuti, S.E.
Penata TK.I / IIId
NIP. 19830810 201101 2 005

LAMPIRAN II

RENJA



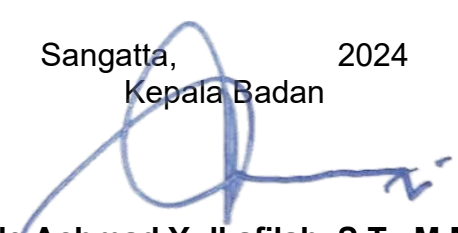
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kegiatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai yang direncanakan. Sebagai pedoman operasional dalam menjalankan peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Kutai Timur, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program, kegiatan dan Sub Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur, disamping itu untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dengan harapan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan SKPD.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga selesainya RENJA BPKAD ini, kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga bermanfaat bagi semua.

Sangatta, 2024
Kepala Badan


Ade Achmad Yulkafilah, S.T., M.M.
NIP 197507172007011014



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	I – 1
1.1. Latar Belakang.....	I – 1
1.2. Landasan Hukum	I – 5
1.3. Maksud dan Tujuan	I – 6
1.4. Sistematika Penulisan	I – 7
 BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
 LALU	II – 1
2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Resntra Perangkat Daerah	II – 1
 BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN ..	III – 1
3.1. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	III – 3
 BAB. IV PENUTUP	IV – 1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan yang berlaku saat ini di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut disebutkan bahwa **Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) atau rencana pembangunan tahunan (*annual plan*) menjadi 'Instrument Penting' pembangunan daerah karena memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan, disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA). Dengan demikian maka Renja Perangkat Daerah memiliki kedudukan penting dalam pembangunan daerah, disamping kewajiban bagi semua Perangkat Daerah dalam pelaksanaan amanat peraturan perundangan.

Adapun pada aspek operasionalisasi penyusunan, kegiatan penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dilaksanakan dengan tahapan proses sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renja PD

Dalam tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang kelancaran penyusunan kegiatan antara lain: persiapan teknis, antara lain meliputi menyiapkan kelengkapan administrasi.

2. Penyusunan Renja PD



Meliputi Tahap Perumusan Rancangan Renja dan Tahap Penyajian Renja Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Rancangan Akhir Renja

Penyusunan Rancangan Akhir Renja merupakan penyempurnaan rancangan Renja, yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Kutai Timur.

4. Penetapan Renja

Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Renja BPKAD Kabupaten Kutai Timur, mengacu pada RKPD, Renstra BPKAD, dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, dan juga berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Perencanaan strategik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup:

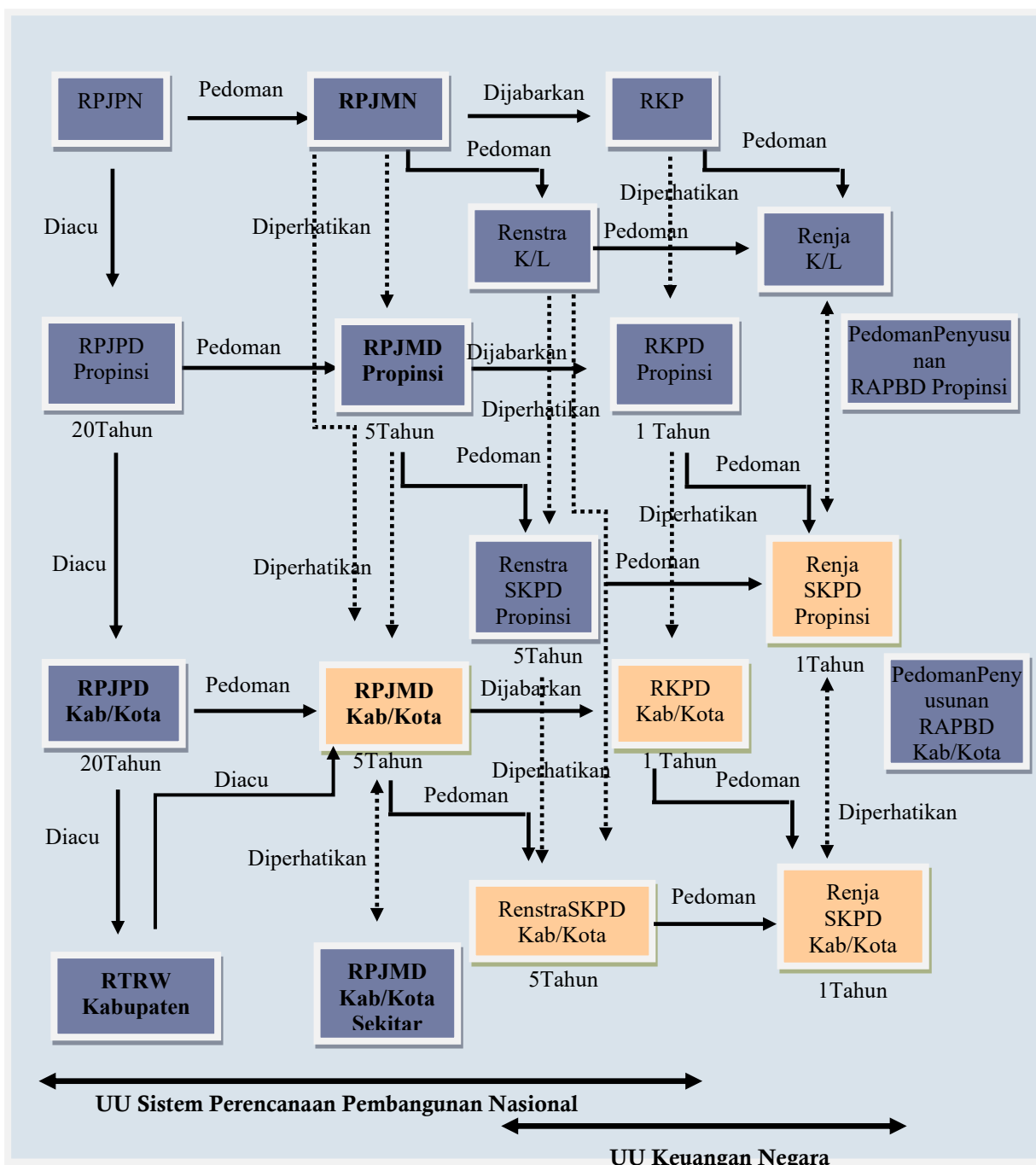
1. Uraian tentang visi, misi, strategi, dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi;
2. Uraian tentang tujuan, sasaran, dan aktivitas organisasi dan
3. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan memperhatikan fungsi pokok dan tugas instansi yang bersangkutan.
4. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah adalah alat pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus memperhatikan antara lain prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada **komitmen** dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah daerah yang bersangkutan.
2. Harus merupakan suatu **sistem** yang dapat **menjamin** penggunaan sumberdaya-sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan **tingkat pencapaian** tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus **berorientasi** pada **pencapaian** visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus **jujur**, **obyektif**, **transparan** dan **inovatif** sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah daerah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota sebagaimana terlihat pada gambar 1.1. Berdasarkan diagram tersebut RKPD dan RENSTRA Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan (*annual plan*), mengikuti terminologi resmi yang ditetapkan dalam SPPN 2004.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya





1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan

Maksud penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah merupakan perangkat pedoman kerja pembangunan BPKAD Kabupaten Kutai Timur untuk 1 (satu) tahun ke depan yang dipakai sebagai pedoman membangun daerah baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat pada umumnya untuk periode pembangunan tahun 2025.

Secara lebih eksplisit maksud penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Timur selama 1 (satu) tahun yang selaras dengan RENSTRA BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026.
2. Sebagai arahan dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahun 2025.

1.3.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah membentuk susunan rencana dan program pembangunan yang optimal serta berkesinambungan dalam waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan berpedoman pada RENSTRA BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dan RKPD.

Secara lebih eksplisit tujuan penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar lebih terarah, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sebagai pedoman penyusunan penganggaran dan pengendalian, untuk jangka pendek.
3. Sebagai acuan atau dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja BPKAD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN.

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang pengertian, fungsi dan latar belakang Renja BPKAD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH LAHUN LALU.

Bab ini memuat informasi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan juga capaian RENSTRA Perangkat Daerah. Analisis kinerja



pelayanan BPKAD serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan juga review terhadap RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.

Bab ini menjelaskan perumusan dan sasaran, untuk memecahkan isu strategis daerah dan tujuan Rencana Kerja BPKAD

BAB IV. PENUTUP.

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain: penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja BPKAD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan evaluasi kegiatan yang menjadi kewenangan pada BPKAD Kabupaten Kutai Timur yaitu pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan, pada Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan 3 Program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 88 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.095.646.386.621,00 (Satu Triliun Sembilan Puluh Lima Miliar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 232.681.630.159,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau 21,33 %



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Bidang Perhubungan Tahun 2026 dapat dilihat pada table 4.1 dibawah ini;

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. KUTAI TIMUR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								1.223.791.257.807,00	1.383.373.861.284,00	1.507.963.377.123,00	284.172.119.316,00						1.193.475.674.566,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							1.223.791.257.807,00	1.383.373.861.284,00	1.507.963.377.123,00	284.172.119.316,00							1.193.475.674.566,00		
	5.02	KEUANGAN							1.223.791.257.807,00	1.383.373.861.284,00	1.507.963.377.123,00	284.172.119.316,00							1.193.475.674.566,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan				-	100 %	115.064.956.510,00	113.146.461.515,00	143.928.255.253,00	-4.653.408.258,00							110.411.548.252,00		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	2 Dokumen 4 Laporan 7 Dokumen	2.185.460.480,00	2.331.220.473,00	932.335.717,00	-1.253.124.763,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		2.185.469.102,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	214.723.840,00	214.723.840,00	83.619.000,00	-131.104.840,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			214.726.590,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	160.053.490,00	167.839.473,00	83.619.000,00	-76.434.490,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			160.053.669,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	216.570.600,00	216.570.600,00	74.328.000,00	-142.242.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			216.570.920,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	388.231.630,00	388.231.630,00	74.328.000,00	-313.903.630,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			388.231.980,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	402.496.470,00	540.470.730,00	65.037.000,00	-337.459.470,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			402.501.440,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun</i>				7 Dokumen	7 Dokumen	803.384.450,00	803.384.200,00	551.404.717,00	-251.979.733,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			803.384.503,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				-	138 Orang 1 Dokumen 2 Laporan 400 Dokumen	88.524.704.070,00	85.866.624.425,00	125.484.928.833,00	36.960.224.763,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		84.535.132.640,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	86.787.352.500,00	84.129.273.725,00	124.260.656.633,00	37.473.304.133,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			82.797.780.640,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	917.352.000,00	917.352.000,00	764.850.000,00	-152.502.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			917.352.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				200 Dokumen	200 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	107.003.000,00	-12.997.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	199.999.970,00	199.999.500,00	68.016.500,00	-131.983.470,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	499.999.600,00	499.999.200,00	284.402.700,00	-215.596.900,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	0 Orang 0 Paket	10.805.429.090,00	9.723.433.930,00	0,00	-10.805.429.090,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		11.159.476.510,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				7 Paket	7 Paket	616.672.580,00	697.934.420,00	0,00	-616.672.580,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																							
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				980 Orang	980 Orang	10.188.756.510,00	9.025.499.510,00	0,00	-10.188.756.510,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.159.476.510,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	12 Laporan 5 Paket	4.647.162.910,00	5.398.368.921,00	3.700.902.590,00	-946.260.320,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		3.910.270.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	573.323.270,00	1.324.422.481,00	566.913.885,00	-6.409.385,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	318.394.440,00	318.501.440,00	395.783.705,00	77.389.265,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.070.603.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																							
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	355.809.200,00	355.809.000,00	179.212.000,00	-176.597.200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3.399.636.000,00	3.399.636.000,00	2.558.993.000,00	-840.643.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.439.667.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	26 Unit	6.726.000.000,00	6.978.496.000,00	6.678.480.000,00	-47.520.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		6.726.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				12 Unit	34 Unit	6.726.000.000,00	6.978.496.000,00	6.678.480.000,00	-47.520.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.726.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	12 Laporan 4 Laporan	876.199.960,00	1.548.317.766,00	1.802.583.342,00	926.383.382,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		595.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	580.999.960,00	580.999.960,00	432.110.000,00	-148.889.960,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	295.200.000,00	967.317.806,00	1.370.473.342,00	1.075.273.342,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			295.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	35 Unit 6 Unit	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	5.329.024.771,00	4.029.024.771,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1.300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	35 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	312.060.000,00	12.060.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5.016.964.771,00	4.016.964.771,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan				-	WTP Predikat	1.077.254.301.297,00	1.239.028.332.010,00	1.338.894.395.983,00	-24.786.279.983,00							1.052.468.021.314,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Panganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				-	0 Dokumen 0 Orang 110 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen Dokumen	9.500.000.000,00	9.499.996.500,00	2.880.496.000,00	-6.619.504.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		9.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.092.542.982,00	1.092.542.500,00	1.015.432.000,00	-77.110.982,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1.092.542.982,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	840.974.982,00	840.974.500,00	0,00	-840.974.982,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		840.974.982,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				57 Dokumen	57 Dokumen	839.262.982,00	839.262.500,00	811.582.500,00	-27.680.482,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		839.262.982,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				57 Dokumen	57 Dokumen	658.622.880,00	658.622.500,00	0,00	-658.622.880,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		658.622.880,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				57 Dokumen	57 Dokumen	871.680.212,00	871.680.000,00	333.876.000,00	-537.804.212,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		871.680.212,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				57 Dokumen	57 Dokumen	680.566.310,00	680.566.000,00	0,00	-680.566.310,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	- -		680.566.310,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.050.449.991,00	1.050.449.500,00	719.605.500,00	-330.844.491,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.050.449.991,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	690.697.185,00	690.697.000,00	0,00	-690.697.185,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			690.697.185,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	2.775.202.476,00	2.775.202.000,00	0,00	-2.775.202.476,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.775.202.476,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				-	0 Dokumen 0 Orang 12 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 330 Dokumen	9.270.000.000,00	8.787.891.510,00	2.419.558.110,00	-6.850.441.890,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		11.900.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				180 Dokumen	180 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	337.657.000,00	-262.343.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				300 Dokumen	300 Dokumen	400.000.000,00	359.864.000,00	250.285.000,00	-149.715.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	189.036.000,00	-110.964.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				20 Dokumen	20 Dokumen	200.000.000,00	150.259.610,00	85.150.610,00	-114.849.390,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	199.998.000,00	147.972.000,00	-52.028.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																			
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				4 Laporan	4 Laporan	470.000.000,00	340.958.000,00	330.031.000,00	-139.969.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000,00	999.999.900,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00	299.999.000,00	347.621.000,00	47.621.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																			
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000.000,00	936.904.000,00	731.805.500,00	-468.194.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				308 Orang	308 Orang	4.600.000.000,00	4.599.909.000,00	0,00	-4.600.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				-	0 Dokumen 0 Laporan 0 Lembaga 0 Orang 1 Laporan 250 Laporan 586 Dokumen 58 Dokumen	9.000.000.000,00	8.922.577.500,00	2.877.589.000,00	-6.122.411.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		9.577.172.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				250 Laporan	250 Laporan	1.022.828.000,00	1.022.828.000,00	1.411.246.000,00	388.418.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																			
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				586 Dokumen	586 Dokumen	950.000.000,00	950.000.000,00	806.994.000,00	-143.006.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			950.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	272.577.500,00	432.738.000,00	82.738.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.854.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>				58 Dokumen	58 Dokumen	333.500.000,00	333.500.000,00	226.611.000,00	-106.889.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			325.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																			
			<i>Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>				40 Dokumen	40 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				1000 Orang	1000 Orang	4.673.672.000,00	4.673.672.000,00	0,00	-4.673.672.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.977.172.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina</i>				25 Lembaga	25 Lembaga	870.000.000,00	870.000.000,00	0,00	-870.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			870.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>				-	1 Laporan	1.049.484.301.297,00	1.211.817.866.500,00	1.330.716.752.873,00	281.232.451.576,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1.021.490.849.314,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	1.029.484.301.297,00	1.191.817.866.500,00	1.305.308.102.072,00	275.823.800.775,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA DESA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.001.490.849.314,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	25.408.650.801,00	5.408.650.801,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	- -			20.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-				-	-	31.472.000.000,00	31.199.067.759,00	25.140.725.887,00	-875.895.000,00							30.596.105.000,00		
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Standar Harga yang Disusun				-	0 Orang 1 Dokumen 1 Laporan	31.472.000.000,00	31.199.067.759,00	25.140.725.887,00	-6.331.274.113,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		30.596.105.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																			
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.727.383.740,00	1.727.382.600,00	1.015.262.600,00	-712.121.140,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.739.405.771,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	274.283.930,00	274.283.000,00	145.268.000,00	-129.015.930,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			286.295.930,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	448.726.068,00	322.183.500,00	136.404.000,00	-312.322.068,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			431.326.652,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				57 Laporan	57 Laporan	2.557.957.440,00	2.557.957.000,00	2.546.720.000,00	-11.237.440,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.556.518.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20.754.380.000,00	20.734.703.000,00	20.426.159.000,00	-328.221.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.754.380.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	327.419.575,00	327.419.575,00	169.455.000,00	-157.964.575,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			327.439.379,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	1.173.843.552,00	1.173.843.552,00	451.028.287,00	-722.815.265,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.173.852.629,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	485.084.163,00	358.374.000,00	250.429.000,00	-234.655.163,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			485.090.163,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				400 Orang	400 Orang	3.722.921.532,00	3.722.921.532,00	0,00	-3.722.921.532,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.841.796.476,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		J U M L A H							1.223.791.257.807,00	1.383.373.861.284,00	1.507.963.377.123,00	284.172.119.316,00						1.193.475.674.566,00			